



DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MERAUKE

DYNAMICS OF BUREAUCRATIC REFORM IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MERAUKE REGENCY

Damianus Katayu

STISIPOL Yaleka Maro Merauke

Email: katayudamianus@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-12-2024

Revised : 26-12-2024

Accepted : 28-12-2024

Published: 31-12-2024

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of bureaucratic reform in village fund management in Merauke Regency, with a focus on structural and cultural factors that influence the implementation of the policy, and to formulate strategies to improve the effectiveness of adaptive and sustainable village governance. A qualitative approach with a case study method is used to deeply understand the challenges faced by village governments in managing village funds, as well as efforts made to improve transparency and accountability. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, documentation studies, and Focus Group Discussions (FGD) involving village officials, communities, local governments, village assistants, and supervisory institutions. The results of the study indicate that although there have been changes in the structure of the village bureaucracy, the main challenge faced is the limited capacity of village officials in managing administration and financial reporting. Community participation is also still low, influenced by social and cultural factors. However, there are indications of increased transparency and accountability in the management of village funds thanks to the bureaucratic reform that has been implemented. This study suggests the need to increase the capacity of village officials, utilize technology in supervision, and closer collaboration between the government, the community, and supervisory institutions to create more effective, transparent, and sustainable village fund governance, in order to achieve community welfare at the village level.

Keywords: *bureaucratic reform, village fund management, village official capacity, transparency, community participation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke, dengan fokus pada faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan aparatur desa, masyarakat, pemerintah daerah, pendamping desa, dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam struktur birokrasi desa, tantangan utama yang dihadapi adalah kapasitas aparatur desa yang terbatas dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Partisipasi masyarakat juga masih rendah, dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Namun, ada indikasi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkat reformasi birokrasi yang telah diterapkan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga



pengawas untuk menciptakan tata kelola dana desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kata kunci: reformasi birokrasi, pengelolaan dana desa, kapasitas aparatur desa, transparansi, partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke menjadi aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi program pembangunan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kapasitas aparatur desa, akuntabilitas penggunaan dana, serta pengawasan dari pihak terkait. Reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Kettl 2022).

Dalam praktiknya, dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Merauke dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Secara struktural, kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Annahar et al. 2023) (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023). Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta prosedur administrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Dari aspek kultural, pola pikir birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan dana desa turut menjadi kendala dalam mencapai tata kelola yang transparan dan akuntabel (Su et al. 2024).

Dalam implementasi reformasi birokrasi terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan transparansi. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki kompetensi administratif dan keuangan yang memadai, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan penggunaan dana desa. Selain itu, prosedur birokrasi yang panjang dan kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah sering kali menghambat penyaluran serta realisasi program pembangunan desa.

Di sisi lain, masih ditemukan praktik pengelolaan dana desa yang kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat. Kurangnya pengawasan dari lembaga terkait serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran desa menyebabkan munculnya potensi penyimpangan dalam alokasi dana (Firanti and Biduri 2024). Beberapa desa di Kabupaten Merauke juga menghadapi tantangan dalam mengatasi budaya birokrasi yang masih bersifat patrimonial, di mana keputusan lebih banyak didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam distribusi program pembangunan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya banyak menyoroti efektivitas pengelolaan dana desa serta tantangan birokrasi di tingkat desa, namun masih terbatas dalam menganalisis secara mendalam dinamika reformasi birokrasi dalam konteks lokal Kabupaten Merauke. Sebagian besar kajian yang ada lebih



berfokus pada aspek regulasi dan akuntabilitas keuangan tanpa mempertimbangkan faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat pentingnya reformasi birokrasi dalam memastikan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif di Kabupaten Merauke. Dengan besarnya alokasi dana desa, kegagalan dalam tata kelola dapat berdampak pada lambatnya pembangunan serta ketimpangan sosial di tingkat desa. Selain itu, minimnya kajian yang secara spesifik membahas dinamika reformasi birokrasi di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik seperti Merauke membuat penelitian ini semakin relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, aparatur desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan kapasitas pengelola dana desa, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara lebih aktif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam menganalisis reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kondisi Kabupaten Merauke. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek regulasi dan mekanisme administrasi, penelitian ini mengeksplorasi dinamika birokrasi dari perspektif struktural dan kultural, termasuk bagaimana faktor geografis, sosial, dan budaya mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti strategi peningkatan efektivitas birokrasi melalui pemberdayaan aparatur desa, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga solusi praktis bagi pemangku kebijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke dengan menyoroti faktor struktural dan kultural serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap faktor-faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa. Studi kasus diterapkan untuk menggali berbagai pengalaman, tantangan, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara efektif dan transparan. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Merauke yang menjadi penerima dana desa dan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemilihan desa dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria seperti tingkat efektivitas pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat, serta karakteristik geografis yang dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Subjek penelitian meliputi aparatur desa, masyarakat, pemerintah daerah,



pendamping desa, serta lembaga pengawas yang memiliki peran strategis dalam proses reformasi birokrasi dan pengelolaan dana desa.

Untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan terhadap aparatur desa dan pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh pemahaman tentang tata kelola dana desa, hambatan birokrasi, serta inisiatif reformasi yang telah diterapkan. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati bagaimana proses pengelolaan dana desa berlangsung di lapangan, termasuk pola komunikasi dan koordinasi antaraktor yang terlibat. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis regulasi, laporan keuangan desa, dan kebijakan terkait untuk memahami mekanisme administratif yang diterapkan. Focus Group Discussion (FGD) juga digunakan untuk menggali perspektif kolektif dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola dana desa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik, yang terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti hambatan birokrasi, peran masyarakat, serta strategi reformasi yang diterapkan. Kedua, data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, di mana pola dan temuan utama dijelaskan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika reformasi birokrasi di tingkat desa. Ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori dan kebijakan yang relevan.

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memastikan konsistensi informasi. Member checking diterapkan dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh. Selain itu, audit trail dilakukan untuk mencatat setiap tahapan penelitian secara sistematis, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dalam mengkaji dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi optimalisasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Berbagai temuan menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan efektif akibat kendala struktural, administratif, serta rendahnya kapasitas aparatur desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa masih terbatas, meskipun terdapat upaya peningkatan keterlibatan melalui berbagai program pemerintah. Untuk memahami lebih lanjut, hasil penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa aspek utama berikut.



Tabel 1. Dinamika Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Dana Desa

Aspek	Temuan Penelitian
Perubahan dalam Sistem Birokrasi Desa	Penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru dalam pengelolaan dana desa.
	Digitalisasi administrasi mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi.
	Peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam perencanaan anggaran
Peran Pemerintah Daerah	Bimbingan teknis dan supervisi kepada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
	Regulasi daerah yang memperjelas mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan desa.
	Pembentukan tim monitoring independen untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa
Hambatan Struktural dan Administratif	Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola keuangan desa.
	Kompleksitas regulasi yang sering berubah, menyebabkan kesulitan implementasi kebijakan.
	Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi yang masih banyak dilakukan secara manual.

Tabel 1 di atas mengungkapkan beberapa temuan terkait dinamika reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru dan digitalisasi administrasi di desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan pendamping desa juga telah ditingkatkan untuk memperlancar perencanaan anggaran. Di sisi lain, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan regulasi yang jelas terkait pengawasan dan pelaporan keuangan. Namun, hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas regulasi yang sering berubah masih menjadi tantangan utama. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam administrasi desa masih terbatas, dengan sebagian besar proses administrasi dilakukan secara manual, yang memperlambat efektivitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Tantangan dalam Tata Kelola Dana Desa

Tantangan	Temuan Penelitian
Kompleksitas regulasi dan kendala administratif	Regulasi yang sering berubah menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan. Aparatur desa kesulitan dalam memahami prosedur administrasi yang rumit.
Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan	Banyak aparatur desa belum memiliki keterampilan teknis dalam menyusun perencanaan anggaran dan laporan keuangan yang akurat. Minimnya pelatihan menghambat efektivitas pengelolaan dana desa.
Minimnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan dana desa	Mekanisme pengawasan masih lemah akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya sistem audit internal. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa ditemukan akibat kurangnya transparansi.



Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tata kelola dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi, kapasitas aparatur desa, dan pengawasan. Kompleksitas regulasi dan prosedur administratif yang sering berubah menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan menghambat efektivitas pengelolaan dana. Minimnya pengawasan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana desa akibat lemahnya keterlibatan masyarakat dan sistem audit internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pelatihan aparatur desa, penyederhanaan regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan agar dana desa dapat dikelola lebih transparan dan akuntabel.

Tabel 3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Aspek	Temuan
Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi Program Dana Desa	Masyarakat di beberapa desa menunjukkan partisipasi yang rendah dalam perencanaan dan evaluasi program dana desa, dengan sebagian besar keputusan diambil oleh aparatur desa tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, ada beberapa desa yang telah melakukan musyawarah desa untuk mengajak masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi.
Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	Faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesenjangan sosial di beberapa desa menghambat partisipasi aktif masyarakat. Budaya tradisional yang lebih mengutamakan otoritas perangkat desa juga memengaruhi keterlibatan masyarakat. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau juga menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi.
Strategi Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Tata Kelola Dana Desa	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan literasi keuangan desa, serta penguatan sistem komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penyederhanaan prosedur partisipasi, seperti penggunaan media sosial atau aplikasi desa, juga menjadi strategi yang diusulkan untuk memperbaiki keterlibatan masyarakat. Di beberapa desa, pelibatan tokoh adat dalam musyawarah desa dapat meningkatkan partisipasi.

Tabel 3 ini menyajikan temuan terkait tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program dana desa, faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi, serta strategi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola dana desa. Dapat dilihat bahwa meskipun ada beberapa desa yang berhasil melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, masih terdapat tantangan terkait rendahnya partisipasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan geografis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penyederhanaan prosedur partisipasi agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel.



Tabel 4. Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Aspek	Hasil Penelitian
Perubahan dalam mekanisme akuntabilitas dan transparansi	Setelah reformasi birokrasi, terjadi peningkatan mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur dan terjadwal.
	Penggunaan sistem pelaporan elektronik mempermudah pengawasan dan akses informasi bagi masyarakat dan lembaga pengawas
Peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga desa dan masyarakat	Lembaga desa dan masyarakat kini lebih aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan, terutama melalui forum musyawarah desa.
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menyebabkan lebih banyak laporan terhadap penyimpangan dana desa
Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan desa dalam mengelola dana secara transparan	Ada peningkatan signifikan dalam kepatuhan desa terhadap regulasi keuangan dan prosedur akuntansi yang lebih jelas.
	Desa menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dana yang transparan, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyuluhan kepada semua pihak

Tabel 4 menunjukkan hasil penelitian mengenai dampak reformasi birokrasi terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke. Reformasi birokrasi terbukti meningkatkan mekanisme pelaporan, efektivitas pengawasan oleh lembaga desa dan masyarakat, serta tingkat kepatuhan desa dalam mengelola dana secara transparan. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, tantangan dalam penyuluhan dan pengawasan di tingkat desa masih perlu diperhatikan untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal.

Pembahasan

Setelah penerapan reformasi birokrasi, terjadi perubahan signifikan dalam struktur birokrasi desa, terutama dalam hal pemetaan tugas dan tanggung jawab aparatur desa. Sebelumnya, tugas dan tanggung jawab perangkat desa seringkali bersifat tumpang tindih dan kurang terstruktur dengan jelas, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana desa. Reformasi birokrasi mendorong pembagian tugas yang lebih spesifik dan sistematis (Monteiro and Adler 2022), sehingga setiap aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawabnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa, termasuk pengelolaan dana desa. Selain itu, reformasi ini juga memperkenalkan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan, yang memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif.

Namun, perubahan struktural ini tidak selalu berjalan mulus, terutama karena adanya pengaruh budaya birokrasi tradisional yang masih kuat di beberapa desa. Budaya birokrasi yang lebih hierarkis dan paternalistik seringkali menghambat aliran informasi dan koordinasi yang efisien antar perangkat desa. Pada beberapa desa, perangkat desa lebih mengutamakan hubungan personal atau patronase dalam pengambilan keputusan, yang dapat memperlambat implementasi reformasi



birokrasi. Oleh karena itu, meskipun ada upaya perubahan struktural, pengaruh budaya birokrasi tradisional yang mengedepankan otoritas sentral dan kurangnya keterbukaan dalam komunikasi mempengaruhi efektivitas reformasi. Untuk itu, penting dilakukan perubahan kultural yang mendukung lebih banyak keterlibatan dan kolaborasi antar perangkat desa, agar struktur birokrasi yang lebih jelas dapat berjalan dengan baik (Martiani 2024).

Perubahan struktural dan kultural ini juga mempengaruhi pola komunikasi dan koordinasi antar perangkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang terbiasa bekerja secara individu mulai beradaptasi dengan pola kerja yang lebih kolaboratif dan terintegrasi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam mengubah cara kerja lama yang terkesan terpisah-pisah menjadi sistem yang lebih holistik. Adanya resistensi terhadap perubahan dari beberapa anggota perangkat desa yang terbiasa dengan cara kerja lama menjadi hambatan (Savitri et al. 2024), tetapi secara keseluruhan, adanya pembaruan dalam struktur birokrasi desa membawa dampak positif terhadap koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, meskipun perubahan struktural dan kultural memerlukan waktu untuk diterapkan sepenuhnya, hasilnya menunjukkan adanya perbaikan dalam alur komunikasi dan efektivitas pelaksanaan program desa.

Pengelolaan dana desa di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh aparatur desa. Kebijakan terkait dana desa seringkali mengalami perubahan, baik dari segi mekanisme maupun peraturan yang harus diikuti. Perubahan regulasi yang cepat dan sering menyebabkan kebingungannya aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Prihantono and Syaifulloh 2025). Ketidapahaman terhadap regulasi yang berlaku juga menyebabkan banyak desa kesulitan dalam menyusun rencana anggaran dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program di lapangan dengan aturan yang ada, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan dana desa.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh aparatur desa. Banyak aparatur desa yang tidak memiliki pelatihan atau pendidikan formal yang memadai terkait dengan pengelolaan dana desa. Keterbatasan pengetahuan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam merancang perencanaan yang optimal (Georgiadis and Georgiadis 2021), termasuk dalam hal penyusunan anggaran, pelaksanaan program, dan pengawasan dana. Banyak desa yang juga kekurangan sumber daya manusia dengan keahlian khusus di bidang keuangan dan akuntansi, yang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan dana desa. Sebagai hasilnya, pengelolaan dana desa sering kali dilakukan dengan cara yang konvensional dan kurang transparan, yang membuka celah untuk terjadinya penyalahgunaan dana.

Masalah lainnya terkait dengan sistem pelaporan keuangan yang belum optimal di banyak desa. Sistem pelaporan yang ada cenderung manual dan kurang efisien, sehingga menyulitkan pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Proses pelaporan yang lambat dan sering tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi. Ketidaksesuaian antara ekspektasi kebijakan reformasi dan kapasitas desa dalam menghadapi tuntutan administratif yang semakin kompleks semakin memperburuk situasi ini. Reformasi birokrasi yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dana desa terkadang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam



menjalankan tugasnya (Fadila et al. 2024). Akibatnya, meskipun ada kebijakan yang baik, pengelolaan dana desa tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan keberhasilan reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa menjadi terbatas.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke menunjukkan variasi yang cukup signifikan, terutama dalam tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam hal perencanaan, masyarakat cenderung terlibat dalam musyawarah desa yang menjadi forum untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Namun, meskipun forum ini terbuka, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif. Hal ini terutama terlihat pada kelompok masyarakat yang kurang terampil atau kurang memiliki pemahaman tentang proses administrasi, yang mengakibatkan ketimpangan dalam tingkat keterlibatan. Pada tahap pelaksanaan, meskipun beberapa desa telah berusaha mengajak masyarakat untuk terlibat langsung, seperti dalam kerja bakti atau kegiatan pembangunan fisik, tingkat partisipasi masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Terakhir, dalam tahap evaluasi, meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui pembentukan kelompok pengawas desa, efektivitas keterlibatan mereka masih terbatas, seringkali dikendalikan oleh dinamika kekuasaan lokal yang menghambat partisipasi yang lebih luas.

Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Di beberapa desa, norma sosial yang mengutamakan otoritas pemimpin adat atau kepala desa menghambat masyarakat dari peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Kepercayaan terhadap pemimpin desa yang kuat seringkali menurunkan sikap kritis masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Lazar, Tokan, and Niron 2024). Selain itu, faktor pendidikan dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel juga menjadi kendala besar. Di beberapa wilayah, tingkat pendidikan yang masih rendah menghambat masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses yang memerlukan pengetahuan administrasi dan keuangan. Kesadaran akan hak mereka sebagai warga negara yang berhak mengawasi penggunaan dana desa masih rendah, dan banyak yang merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan mengubah hasil. Hambatan-hambatan ini menciptakan kesenjangan dalam pengawasan dana desa, yang pada akhirnya mempengaruhi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

Reformasi birokrasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu perubahan utama yang terlihat adalah penerapan prinsip-prinsip good governance (tata kelola yang baik) dalam administrasi dana desa. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang lebih terbuka, adanya prosedur yang jelas dalam penggunaan dana, serta pelaporan yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Desa-desa yang menerapkan reformasi ini menunjukkan adanya upaya untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi anggaran, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana desa. Penerapan prinsip transparansi ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa yang sebelumnya banyak terjadi akibat kurangnya pengawasan yang efektif (Suryani and Gaol 2025).



Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal transparansi, implementasi akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa desa masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang memadai dan memahami secara mendalam prinsip akuntabilitas yang berlaku. Terkadang, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi yang rumit dan mekanisme pelaporan yang sesuai menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi penggunaan dana (Bajamal et al. 2025). Selain itu, meskipun ada peningkatan transparansi, masyarakat sering kali kurang memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan desa atau merasa kesulitan dalam memahami proses administrasi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan, masih ada tantangan dalam memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa.

Efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa juga menjadi fokus penting dalam reformasi birokrasi ini. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, baik lembaga pemerintah seperti Inspektorat Kabupaten maupun lembaga masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat sipil. Namun, meskipun pengawasan dilakukan secara rutin, tantangan muncul terkait dengan kapasitas dan independensi pengawas. Lembaga pengawas di tingkat desa sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknis, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang mendalam dan terfokus. Pengawasan masyarakat juga terkendala oleh kurangnya pemahaman mereka tentang mekanisme pengelolaan dana desa, serta adanya kendala sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat (Sulistiyowati and Nataliawati 2022). Oleh karena itu, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih diperlukan penguatan pengawasan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat agar dana desa benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas pengawas desa, memperkenalkan teknologi yang mempermudah proses monitoring dan pelaporan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengawasan dana desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Merauke mengalami perkembangan signifikan meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun struktur birokrasi telah mengalami perubahan, masih terdapat hambatan terkait dengan kapasitas aparatur desa yang terbatas dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa cenderung rendah, yang disebabkan oleh faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kesadaran serta keterlibatan mereka. Namun, ada indikasi positif bahwa upaya transparansi dan akuntabilitas semakin diperkuat seiring dengan adanya reformasi ini, meskipun pengawasan masih perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi yang lebih baik antara semua pihak terkait untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Annahar, Nasrun, Ida Widianingsih, Entang Adhy Muhtar, and Caroline Paskarina. 2023. "The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia." *Sustainability* 15(11):8616.
- Bajamal, Jinan Abdulkadir, Darman Darman, Mohammad Nofal, and Cici Rianty K. Bidin. 2025. "Peran Sosialisasi Pengelolaan Dana Dalam Meningkatkan Realisasi Anggaran: Indonesia." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 5(1):491–506.
- Fadila, Uci Khusnul, Riana Mayasari, Deni Widi Alfiansyah, Ryna Agustina, and Shakila Putri Permata. 2024. "The Influence Of Accountability In Village Fund Allocation, Village Policies, And Village Institutions On Tourism Management (An Empirical Study Of Edutourism In Teluk Perepat)." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 8(1).
- Firanti, Nuriya, and Sarwenda Biduri. 2024. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1(3):17.
- Georgiadis, Georgios P., and Michael C. Georgiadis. 2021. "Optimal Planning of the COVID-19 Vaccine Supply Chain." *Vaccine* 39(37):5302–12.
- Kettl, Donald F. 2022. "Weberian Bureaucracy and Contemporary Governance." *Perspectives on Public Management and Governance* 5(2):111–20.
- Lazar, Flaviani Claudia Tania, Frans Bapa Tokan, and Eusabius Separera Niron. 2024. "Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamabelawa." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8(2):219–39.
- Martiani, Astrid Tania. 2024. "IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA." *Journal of Politic and Government Studies* 14(1):392–409.
- Monteiro, Pedro, and Paul S. Adler. 2022. "Bureaucracy for the 21st Century: Clarifying and Expanding Our View of Bureaucratic Organization." *Academy of Management Annals* 16(2):427–75.
- Prihantono, Victory Raphael, and Hafid Syaifullah. 2025. "ANALISIS SWOT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN INDUSTRI DI JAWA TIMUR MELALUI INTEGRASI DATA OSS DAN SIINAS DENGAN SINGLE SIGN-ON." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9(1):808–15.
- Savitri, Enni, Andreas Andreas, Volta Diyanto, Evi Deliana, and Amir Hamzah. 2024. "Peningkatan Pendapatan Desa Menuju Desa Mandiri Melalui Tata Kelola Dan Sistem Pelaporan Keuangan Desa Dan BUMDes." Pp. 150–59 in *Unri Conference Series: Community Engagement*. Vol. 6.
- Su, Shan, Xi Ji, Zhenhua Su, and Aimei Chen. 2024. "Public Sector Design Efficacy in Rural Development: A Case Study of the Future Village Project in Changdai Village, China." *International Journal of Design* 18(3):73–87.
- Sulistyowati, Rina, and Rita Nataliawati. 2022. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6(2):1798–1811.
- Suryani, Pesi, and Lasando Lumban Gaol. 2025. "Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata Di Bali." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*



8(1):593–604.

Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke.” *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.